

**IMPLEMENTASI PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN  
KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA (PUPKKHP)  
DALAM RANGKA MENGENTASKAN PENGANGGURAN PEMUDA DI  
KABUPATEN BATANG**

Oleh

Radha Irjayani, Dra. Dewi Rostyaningsih, M.Si

**Departemen Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos  
1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http:// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto: fisip@undip.ac.id)

**ABSTRAKSI**

Pemuda memiliki peran strategis dalam perubahan yang fundamental dalam pembentukan karakter bangsa Indonesia melalui program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Maka, perlu peranan negara dalam memberdayakan pemuda Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sakernas Agustus 2011-2013 Jawa Tengah, TPT di Kabupaten Batang mengalami fluktuasi dimana TPT pada tahun 2012 sebesar 5,90% dari 5,91% pada tahun 2011 dan 6,98% pada tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda di Kabupaten Batang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif tipe deskriptif. Adapun penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik snowballing. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang diterapkan ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) dalam Rangka Mengentaskan Pengangguran Pemuda di Kabupaten Batang masih belum maksimal. Dari ketiga tahapan dalam proses implementasi program ini masih terdapat hambatan-hambatan. Maka dapat disimpulkan bahwa adanya program ini belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mengurangi pengangguran pemuda sebab belum adanya solusi dalam hal permodalan dan bimbingan secara praktik benar-benar dilapangan serta tidak maksimalnya anggaran yang mempengaruhi ketersediaan waktu serta fasilitas pelatihan yang mana juga diakibatkan dari tidak dijabarkannya program secara langsung oleh Disdikpora

sendiri. Disarankan agar ada sistem pinjaman modal, bimbingan saat merintis usaha, dan membuat sistem sewa alat.

**Kata Kunci : : Implementasi Program, Pemuda, kewirausahaan, kecakapan hidup, Disdikpora**

## **PENDAHULUAN**

### **A.Latar Belakang**

Pemuda adalah inisiator dan pelaku perjuangan bangsa mencapai kemerdekaan. Pemuda adalah pewaris nilai luhur budaya dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Pemuda memiliki peran strategis dalam perubahan yang fundamental dalam pembentukan karakter bangsa. Pemuda juga sangat dominan dan memegang peranan sentral dalam konteks perjuangan dan pembangunan di kancah sejarah kebangsaan Indonesia, baik perjuangan dalam bentuk fisik maupun diplomasi, perjuangan melalui organisasi sosial dan politik serta perjuangan melalui kegiatan-kegiatan intelektual. Masa revolusi fisik dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan adalah ladang bagi tumbuh suburnya heroisme pemuda atau generasi muda yang melahirkan semangat patriotisme dan nasionalisme.

Pemuda atau generasi muda yang hidup dalam nuansa dan suasana pergolakan kemerdekaan dan perjuangan akan cenderung memiliki kreativitas tinggi dan

keunggulan untuk melakukan perubahan atas berbagai kerumitan dan masalah yang dihadapi, akan tetapi bagi para pemuda atau generasi muda yang hidup dalam nuansa nyaman, aman dan tentram seperti kondisi sekarang, cenderung apatis, tidak banyak berbuat dan hanya berusaha mempertahankan situasi yang ada tanpa usaha dan kerja keras melakukan perubahan yang lebih baik dan produktif atau bahkan cenderung tidak kreatif sama sekali. Ini merupakan suatu tantangan kedepan dengan semangat patriot sanggup menembus memiliki semangat perubahan bagi bangsanya.

Pada tahun 2004 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 10.251.351 jiwa, pada bulan Februari 2005 mencapai 10.854. 254 jiwa sedangkan di bulan Novemhernya mencapai 11.899.266 jiwa. Jumlah pengangguran di bulan Februari 2006 mencapai 11.104.693 jiwa sedangkan di bulan Agustus mencapai 10.932.000 jiwa. Bulan Februari 2007 mencapai 10.547. 917 jiwa dan di bulan Agustusnya mencapai 10.011.142 jiwa. Jumlah pengangguran bulan Februari 2008

mencapai 9.427.590 jiwa dan di bulan Agustusnya mencapai 9.394.515 jiwa (SatuHarapan.com, Rabu (7/8/13))

Adanya masalah pengangguran kaum muda menggambarkan bahwasanya pemuda belum berperan penuh dalam pembangunan. Pengangguran meliputi penduduk yang sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha, atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran disebabkan oleh jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia, dan pemuda putus sekolah maupun yang lulus namun tidak melanjutkan pendidikannya sehingga tidak terserap ke dunia kerja atau berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan kerja. Pemberdayaan pemuda dalam kemandirian ekonomi sebagai solusi untuk mengatasi masalah pengangguran.

Pemerintah kemudian mengambil suatu tindakan kebijakan berupa lahirnya Undang-Undang

Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dimana didalamnya menjelaskan bahwa Indonesia akan melakukan suatu gerakan pembangunan kepemudaan. Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan. Pelayanan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mengenai hal ini pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah. Begitu pula dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah. Dimana dalam pelaksanaannya pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Februari 2013 tingkat pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 7.170.523 jiwa.

Survei tersebut diambil berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkannya. Jumlah pengangguran untuk tingkat pendidikan SD saat ini mencapai 1.421.653 jiwa, SMP mencapai 1.822.395 jiwa, SLTA umum mencapai 1.841.545 jiwa, SLTA kejuruan saat ini mencapai 847.052 jiwa. Adapun untuk tingkat pendidikan diploma I,II,III (akademi) saat ini jumlah penganggurannya mencapai 192.762 jiwa serta jumlah pengangguran pada tingkat pendidikan universitas saat ini mencapai 421.717 jiwa. Namun jumlah pengangguran untuk masyarakat yang belum pernah mengenyam pendidikan saat ini mencapai 109.865 jiwa. Tercatat dari tahun 2009 sampai bulan Februari 2013 jumlah pengangguran saat ini mengalami penurunan (SatuHarapan.com, Rabu (7/8/13)). Akan tetapi berdasarkan pernyataan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana, tingkat pengangguran kaum muda di Indonesia saat ini masih relatif tinggi meski secara nasional tingkat

pengangguran terbukanya sudah menurun. Ia menjelaskan, tingkat pengangguran kaum muda setidaknya tiga kali lipat dari angka rata-rata pengangguran nasional. Angka pengangguran muda mencapai 19,99 persen dan jumlahnya masih sekitar 4,2 juta orang (Liputan6.com, Selasa (15/5/12)). Menghadapi masalah yang pelik ini tentu diperlukan komitmen kuat pemerintah dan pemerintah daerah. Terlebih peran pemerintah daerah yang perlu melakukan *action* ekstra dalam melaksanakan pembangunan bagi kaum muda di daerahnya masing-masing.

Pemerintah daerah Kabupaten Batang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan pembangunan kepemudaan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 telah mencanangkan Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda. Program ini tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang Tahun 2012-2017.

Penduduk di Kabupaten Batang sebagian besar berada pada rentang usia produktif yaitu usia 15 sampai 40 tahun yang tentu berdampak pada jumlah pencari kerja, angka pengangguran dan besarnya kebutuhan akan ketersediaan fasilitas serta layanan pendidikan maupun pelatihan kerja. Lulusan SLTA adalah pencari kerja dengan prosentase pencari kerja tertinggi di Kabupaten Batang yaitu 66.98%. Kemudian disusul 15.73% adalah lulusan Sarjana, 10.64% lulusan Diploma / sarjana muda, 5.92% lulusan SMP dan sisanya 0.73% adalah lulusan SD. (Batang Dalam Angka, 2010)

Potensi sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan menyongsong era globalisasi adalah tingginya jumlah angkatan kerja yang terampil dan berpendidikan. Hal ini dibutuhkan pendidikan juga pelatihan yang relevan dengan permintaan dunia usaha dan dunia industri yang terus meningkat. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang dilihat dari lingkup tugas dan fungsinya harus mampu

mengakomodir segala kebutuhan akan tenaga kerja yang bersifat terampil dan berpendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar usaha dan atau industri agar dapat meminimalisir pengangguran pada penduduk usia produktif di Kabupaten Batang. Oleh karena itu, melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang terus berupaya membuat program dan kegiatan yang mampu mendukung dan berkontribusi besar dalam mencapai tujuan utama pembangunan pendidikan untuk mengentaskan pengangguran pada kaum muda. Sebab sejatinya pembangunan pendidikan adalah posisi yang strategis dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan secara menyeluruh. Salah satu program tersebut ialah Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah angka yang menunjukkan banyaknya pengangguran, terhadap 100 penduduk yang masuk kategori

angkatan kerja. Definisi dari pengangguran terbuka yaitu angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Kemudian, pendefinisian dari angkatan kerja itu sendiri ialah penduduk dengan usia 15 tahun ke atas. Kabupaten Batang berdasarkan Tabel diatas tercatat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,90% pada tahun 2012 dari 5,91% pada tahun 2011 dan 6,98% pada tahun 2013. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami fluktuasi, dimana TPT mengalami penurunan dari tahun 2011 ke tahun 2012 (0,01%) dan mengalami kenaikan dari tahun 2012 ke tahun 2013 (1,08%). Hal ini tentu memunculkan suatu permasalahan, mengapa pengangguran pada tingkat terbuka pada tahun 2012 tidak mengalami penurunan seperti pada tahun 2011.

Oleh karena itulah perlu dilakukan peninjauan ulang terkait pengimplementasian dari program yang telah dirancang sebelumnya ke dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2012-2017. Bagaimanakah jalannya proses implementasi yang

telah dilakukan dari kebijakan ke program lalu menuju pada *outcome* atau hasil dari program. Hal ini tentu perlu dilakukan, sebab pada umumnya tugas implementasi adalah mengkaitkan realisasi tujuan kebijakan publik dengan hasil kegiatan pemerintah sehingga sangat menentukan keberhasilan dari suatu program. Dengan demikian judul dari penelitian ini adalah **“Implementasi Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda dalam Rangka Mengentaskan Masalah Pengangguran Pemuda di Kabupaten Batang”**.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Proses Implementasi Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda dalam Rangka Mengentaskan Masalah Pengangguran Pemuda di Kabupaten Batang
2. Faktor penghambat dan Faktor pendorong dalam Pengimplementasian Program

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda dalam Rangka Mengentaskan Masalah Pengangguran Pemuda di Kabupaten Batang.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Teoritis**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program, serta mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi pada saat implementasi program tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang.

### **2. Tujuan Praktis**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Batang.

## **D. Kerangka Pemikiran Teoritis**

### **1. Kebijakan Publik**

Dikemukakan oleh Thomas R. Dye (1978) dalam sebuah buku (Solichin A. Wahab,2008:4) yang menjelaskan bahwa kebijakan negara itu adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah.

W.I Jenkins (Solichin A. Wahab,2008:4) merumuskan kebijakan negara sebagai serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi di mana keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas

### **2. Implementasi Kebijakan Publik**

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan

kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekret presiden) (Solichin A. Wahab,2008:64).

Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks dan mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*). Misalnya,

Implementasi dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, atau serangkaian keputusan dan tindakan yang ditujukan agar keputusan-keputusan yang diterima oleh lembaga legislatif bisa dijalankan (Budi Winarno, 2012:147).

Tataran praktis, menurut Jones dalam Widodo (2008:97) implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar. Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

*Pertama*, tahapan interpretasi. Dimana tahapan ini merupakan tahapan penjabaran

sebuah kebijakan yang bersifat abstrak dan sangat umum ke dalam kebijakan atau tindakan yang lebih bersifat manajerial dan operasional.

*Kedua*, tahapan pengorganisasian. Kegiatan pertama tahap ini adalah penentuan pelaksana kebijakan (policy implementor). Setelah pelaksana kebijakan ditetapkan; maka dilakukan penentuan prosedur tetap kebijakan yang berfungsi sebagai pedoman, petunjuk dan referensi bagi pelaksana dan sebagai pencegah terjadinya kesalahpahaman saat para pelaksana tersebut menghadapi masalah. Langkah berikutnya adalah penentuan besaran anggaran biaya dan sumber pembiayaan.

*Ketiga*, tahapan pelaksanaan. Tindakan dalam tahap ini adalah perwujudan masing-masing tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Dimana dalam perwujudannya dicantumkan target capaian.

Pada teori Jones ini dirinci lebih dalam dengan dibagi menjadi beberapa tahapan, dimana dari ketiga tahapan tersebut saling berkaitan dan berpengaruh dalam pengimplementasian suatu program.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan Implementasi adalah suatu proses yang dinamis dimana terdapat berbagai tahapan yaitu interpretasi, pengorganisasian dan implikasi yang perlu dilaksanakan guna mencapai keberhasilan dalam pengimplementasian program.

### **3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda**

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda ini adalah suatu program pembangunan dan

pemberdayaan pemuda dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009. Pembangunan kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Dimana dengan merujuk pada Undang-Undang kepemudaan tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membuat suatu program tentang kepemudaan yang dicantumkan pada Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang yaitu Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda dalam rangka mengentaskan masalah pengangguran pemuda di Kabupaten Batang.

Pelaksanaan dari program ini Disdikpora bekerjasama dengan suatu lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Blado sebagai wadah atau tempat pelatihan kewirausahaan pemuda dan juga bekerjasama dengan LKP Citra Mandiri di Bandar sebagai pelaksana pelatihan kecakapan hidup pemuda berupa ketrampilan menjahit.

#### **4. Implementasi Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda**

Proses implementasi dari Program PUPKKHP ini akan dilihat dari berbagai segi disesuaikan dengan tahapan-tahapan dalam proses pengimplementasian suatu kebijakan yaitu

##### **1. Tahap Interpretasi**

Sejatinya pada tahap ini harus dilakkan suatu penjabaran kebijakan dari yang umum menjadi khusus yaitu dari UU menjadi

perpres atau keputusan Kepala daerah atau Kepala Dinas.

## **2. Tahap Pengorganisasian**

Tahapan ini sendiri telah dirumuskan suatu struktur organisasi sebagai pelaksana atau pengimplementasian serta pedoman dalam pelaksanaan program.

## **3. Tahap Implikasi**

Tahap akhir dimana melihat perwujudan dari berbagai tahapan yang kemudian disesuaikan dengan target capaian.

## **5. Model Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Penulis dalam penelitian ini melakukan pembatasan dimana penulis akan memilih untuk menyajikan beberapa teori yang dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti.

### **1. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1957)**

Lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu (Budi Winarno, 2002:109):

#### **1. Standar dan sasaran kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur. Terdapat ukuran-ukuran dasar dan tujuan – tujuan kebijakan yang jelas.

#### **2. Sumber Daya**

Sumber daya ini layak untuk diperhatikan karena memiliki peran penting guna menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber-sumber yang dimaksud yaitu mencakup sumber dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi kebijakan yang efektif.

3. Hubungan antar Organisasi  
Variabel ini mencakup tentang komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
4. Karakteristik Agen atau Badan Pelaksana  
Pembahasan ini memang tidak bisa luput dari struktur birokrasi. Dimana struktur birokrasi ini berkaitan dengan norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi secara berulang-ulang yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program tertentu.
5. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi  
Hubungan antara sumber daya dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dari organisasi menunjukkan bahwa ketersediaan sumber daya fiskal dan lainnya yang kemudian dapat menciptakan peran serta swasta dan kelompok-kelompok kepentingan untuk berpartisipasi dalam keberhasilan implementasi dari suatu program.
6. Disposisi Implementor  
Pada tahap ini pengalaman-pengalaman subyektifitas individu memegang peran penting pula.  
Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu :
  - a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
  - b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
  - c. Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

## 2. Teori George C. Edwards

### III

Mengkaji implementasi kebijakan, Edward mengajukan dua pertanyaan, yaitu :  
Prakondisi-prakondisi apa yang diperlukan sehingga suatu implementasi kebijakan dapat berhasil? dan hambatan-hambatan utama apa yang menyebabkan suatu implementasi itu gagal? Edward berusaha menjawab dua buah pertanyaan tersebut dengan empat faktor atau variabel yang bersifat krusial dalam implementasi kebijakan publik. Berikut variabel yang mempengaruhi berjalannya suatu implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2002: 125)

:

#### 1. Komunikasi

Secara umum Edwards membahas tiga hal

penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*). (Budi Winarno, 2002: 126).

*Transmisi.* Para pejabat kebijakan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk melaksanakannya telah dikeluarkan supaya mereka dapat mengimplementasikannya.

*Konsistensi.* Aspek lain dari komunikasi yang menyangkut implementasi adalah masalah konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat

menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

*Kejelasan.*

Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

2. Sumber-Sumber

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia (Staff)  
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya.

b. Anggaran

(Budgetary)

Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran.

c. Fasilitas (facility)

Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.

d. Informasi dan Kewenangan

(Information and Authority) Informasi juga menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki.

### 3. Kecenderungan

(Disposisi)

Berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Apabila implementator memiliki sikap yang

baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

## E. Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Batang. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive dan dilanjutkan dengan mencari informan lain melalui teknik snowballing. Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah peneliti

sendiri, kamera, perekam (Hp) dan alat tulis). Teknik untuk menguji keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Analisis interpretasi data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis taksonomi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang.**

#### **1. Tahap Interpretasi program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang.**

Penjabaran dari kebijakan yang masih bersifat umum yaitu Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 kedalam suatu program yang lebih khusus yaitu program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini belum sepenuhnya dilakukan dengan benar yang mana seharusnya dijabarkan oleh Pihak Disdikpora sebagai pelaksana program yang tercantum dalam RENSTRA Disdikpora Kabupaten Batang tahun 2012-2017 meskipun pada pengimplementasiannya bekerja sama dengan Lembaga-Lembaga terpilih yaitu LKP Citra Mandiri dan PKBM Nalendra.

#### **2. Tahap Pengorganisasian program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang.**

##### **a. Pelaksana**

Penentuan pelaksanaan sudah sesuai dengan peran dan tugas mereka, yaitu Disdikpora yang berada di bidang Pemuda, Olahraga dan Pendidikan Non Formal mengingat bahwa

program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang berupa kegiatan pendidikan non formal yang ditujukan kepada pemuda-pemuda di Kabupaten Batang. Serta LKP Citra Mandiri dan PKBM Nalendra yang memang sudah terjun di dunia menjahit dan kewirausahaan yang sesuai dengan kegiatan yang akan mereka laksanakan yaitu kegiatan pelatihan kecakapan hidup yaitu menjahit dan pelatihan kewirausahaan teh.

**b. Tingkat Kesadaran dan Persamaan Persepsi**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa semua masing-masing pelaksana sudah memiliki tingkat kesadaran yang baik serta satu persepsi. Sehingga tingkat kesadaran akan

keberhasilan suatu program dan persepsi akan pentingnya program ini dilakukan tidak menjadi masalah atau hambatan dalam pengimplementasian program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini.

**c. Kelompok Sasaran, mencakup:**

**1. Tingkat Partisipasi**

Partisipasi peserta akan adanya program ini sudah cukup baik maka dapat mendorong pengimplementasian program ini berjalan secara optimal dan mampu mencapai tujuan dan sasaran akan program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang.

d. **Sumber-Sumber,**

**mencakup:**

**1.Ketersediaan Sumber Dana**

Anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini masih kurang memadai, dimana hal ini dapat dipastikan akan menjadi suatu hambatan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini.

**2.Ketersediaan Waktu**

Ketersediaan waktu yang diberikan belum sesuai dengan apa yang di butuhkan sehingga nantinya dapat mengakibatkan

implementasi program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini tidak berjalan dengan efektif dan optimal.

e. **Komunikasi, mencakup:**

**1.Transmisi**

Transmisi komunikasi akan perintah-perintah yang diberikan pihak disdikpora kepada lembaga implementor yaitu LKP Citra Mandiri dan PKBM Nalendra sudah dilakukan dengan benar mengingat adanya diskusi ringan untuk menyamakan perintah dan pemantauan untuk mengontrol terjadinya penyimpangan tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan sehingga terhindar dari miskomunikasi yang

dapat mengakibatkan implementasi kebijakan tidak dapat dilakukan secara optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya.

## **2.Konsistensi**

Konsistensi komunikasi yang diterapkan dalam Implementasi program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang telah dilakukan secara efektif melihat tidak adanya pertentangan selama pelaksanaan atau pengimplementasian program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini dan masing-masing stakeholder sudah mengetahui tupoksi masing-masing.

## **3.Kejelasan**

Kejelasan perintah dalam menjalankan program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini sudah dilakukan secara efektif mengingat masing-masing pelaksana program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini sudah mengetahui perannya masing-masing secara jelas.

## **f.Ketersedian Informasi**

Ketersediaan informasi dalam pengimplementasian program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di

Kabupaten Batang ini sudah dilakukan secara efektif. Dimana informasi yang telah diberikan adalah informasi-informasi yang memang dibutuhkan.

### **3. Tahap Implikasi Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang**

#### **a. Berlangsungnya**

**program ini dijalankan**

Kegiatan yang dilakukan belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sasaran kebijakan. Dimana masyarakat membutuhkan pelatihan atau bimbingan di lapangan secara langsung tidak hanya pelatihan teori dan praktik di masa pelatihan. Jika hal ini tidak dipenuhi maka akan menjadi sulit untuk dapat mencapai tujuan program yaitu mengurangi tingkat pengangguran

pemuda di Kabupaten Batang ini.

#### **b. Capaian yang diperoleh**

Tahap implikasi terkait capaian yang diperoleh belum lah maksimal. Melihat capaian belum jelas dan belum mencapai target yang diharapkan dikarenakan berbagai kendala yang terjadi pada tahap-tahap sebelumnya yaitu tahap interpretasi dan tahap pengorganisasian.

### **B. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda dalam Rangka Mengentaskan Pengangguran Pemuda di Kabupaten Batang**

#### **1. Faktor Pendorong**

##### **a. Pelaksana**

Pelaksana yang dipilih sebagai implementor yaitu lembaga KP Citra Mandiri dan PKBM Nalendra sudah memenuhi kriteria. Dimana mereka telah

menguasai pada bidang pelatihan yang diberikan yaitu dalam ketrampilan menjahit, kewirausahaan dan dagang. Sehingga hal ini dapat menunjang tingkat keberhasilan program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini.

**b. Komunikasi baik**

Komunikasi yang baik tanpa adanya ketimpangan dalam informasi pelaksanaan serta runtutan birokrasi yang tidak rumit menunjang pula tingkat keberhasilan dari pengimplementasian program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang.

**c. Tingkat Partisipasi yang tinggi**

Tingkat partisipasi yang ditunjukkan peserta pelatihan cukup tinggi dilihat dari antusiasme mereka dan ketertarikan mereka serta arti penting program ini untuk mereka. Sehingga dengan partisipasi yang baik ini dapat menjadi faktor pendorong dalam pengimplementasian program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini.

**2. Faktor Penghambat**

**a. Interpretasi Program**

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini bukan lah muncul dari Disdikpora Kabupaten Batang itu sendiri melainkan hanyalah pemberian dari pemerintah provinsi yang

mana ini mengakibatkan tidak ada penjabaran terperinci akan kegiatan yang tentunya tidak dilakukan analisis terlebih dahulu dengan apa yang dituhkan dalam pelatihan sehingga hal ini mampu menghambat berjalannya pengimplementasian dari program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini.

**b. Sumber Dana**

Dana belumlah maksimal, hal ini sebenarnya merupakan dampak pada tahap interpretasi yang tidak dilakukannya penjabaran sebagaimana mestinya. Selanjutnya dengan dana yang kurang maksimal ini lah mengakibatkan fasilitas pelatihan tidak memadai dan waktu pelatihan terbatas. Sehingga dengan demikian tentu dapat

menghambat tingkat keberhasilan pengimplementasi dari program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini.

**c. Waktu**

Waktu yang diberikan tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Hal ini dikarenakan dana yang diberikan terbatas. Sehingga hal ini mengakibatkan pelatihan tidak berjalan dengan baik dan menjadi kendala dalam pengimplementasian dari program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini.

**KESIMPULAN DAN SARAN**

**A. Kesimpulan**

1. Proses Implementasi proram Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang

- a. Masih terdapat banyak kendala yang belum terselesaikan, berawal dari penjabaran kebijakan yang belum tepat yaitu tidak dilakukan oleh Disdikpora melainkan langsung dalam bentuk program yang diberikan kepada Disdikpora Kabupaten Batang oleh Pemerintah Provinsi.
- b. Kendala di tahap pengorganisasian yaitu terkait sumber dana yang berdampak pada fasilitas, dan ketersediaan waktu. Masalah klasik yang memang dapat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu implementasi program itu dijalankan yaitu ketersediaan sumber dana. Sumber dana yang kurang memang dapat

mengakibatkan beberapa kendala seperti fasilitas yang kurang memadai. Pelatihan yang masih mendasar yang mana dipasaran belum bisa bersaing dengan yang lainnya.

- c. Inti permasalahan dari program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini adalah belum dijalankan secara matang sehingga tujuan-tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan adanya program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini tidak dapat terealisasi. Meski para pelaksana sudah satu persepsi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, namun pada kenyataannya

dalam pengimplementasian masih lemah.

## **2. Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat**

### **a. Faktor Pendorong**

#### **1. Pelaksana**

Pelaksana yang dipilih sebagai implementor yaitu lembaga KP Citra Mandiri dan PKBM Nalendra sudah memenuhi kriteria. Dimana mereka telah menguasai pada bidang pelatihan yang diberikan.

#### **2. Komunikasi baik**

Tidak adanya ketimpangan dalam informasi pelaksanaan serta runtutan birokrasi yang tidak rumit menunjang tingkat keberhasilan dari pengimplementasian program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup

Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang.

## **3. Tingkat Partisipasi yang tinggi**

Tingkat partisipasi yang ditunjukkan peserta pelatihan cukup tinggi dilihat dari antusiasme mereka dan ketertarikan mereka serta arti penting program ini untuk mereka.

### **b. Faktor Penghambat**

#### **1. Interpretasi Program**

Tidak ada penjabaran terperinci akan kegiatan yang tentunya tidak dilakukan analisis terlebih dahulu dengan apa yang dituhkan dalam pelatihan sehingga menghambat berjalannya pengimplementasian dari program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini.

## 2. Sumber Dana

Tidak dilakukannya penjabaran sebagaimana mestinya mengakibatkan dana kurang maksimal yang mengakibatkan fasilitas pelatihan tidak memadai dan waktu pelatihan terbatas. Sehingga dapat menghambat tingkat keberhasilan pengimplementasi dari program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini.

## 3. Sumber Waktu

Waktu yang diberikan tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dikarenakan dana yang diberikan terbatas. Sehingga menjadi kendala dalam pengimplementasian dari program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini.

## B. Rekomendasi

1. Pelatihan kecakapan hidup pemuda di LKP Citra Mandiri, yang perlu diupayakan adalah:
  - (1) Terkait modal dapat dilakukan sistem peminjaman modal. Dimana peserta nantinya setelah berjalan usaha yang mereka bangun bisa secara menyicil mengembalikan modal yang telah dipinjamkan

- (2) Jika memungkinkan dilakukan pelatihan lanjutan tidak hanya pelatihan dasar sehingga mereka mampu bersaing di pasaran. Minimal diberikan buku panduan.
- (3) Bagi mereka yang ingin bekerja di konveksi, pihak LKP Citra Mandiri dan Disdikpora seharusnya memjembatani mereka untuk bisa masuk ke perusahaan konveksi tersebut atau melakukan kerjasama dengan perusahaan misalnya PT Garmend yang nantinya juga akan bermanfaat bagi masing-masing pihak yaitu memudahkan PT Garmend dalam mendapatkan karyawan jika sedang membutuhkan dan secara tidak langsung juga membantu terealisasinya program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda (PUPKKHP) di Kabupaten Batang ini.
2. Pelatihan kewirausahaan di PKBM Nalendra yang perlu diupayakan adalah:
- (1) Permasalahan pada alat pengolahan produksi teh dapat menggunakan alat tradisional yang harganya jauh lebih murah. Bisa disediakan dalam suatu tempat yang nantinya dapat digunakan secara bergilir oleh masyarakat dalam memproduksi teh.
- (2) Dibentuknya suatu usaha bersama terdiri dari sasaran pelatihan yang bergabung membentuk usaha teh. Sehingga tidak terlalu berat untuk membentuk atau merintis suatu usaha baru dengan bimbingan dari lembaga PKBM Nalendra dan Disdikpora Kabupaten Batang bahkan bisa dengan Dinas Sosial atau yang menaungi UMKM di Kabupaten Batang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn, William N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, Lexy. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Amir. (2005). *Politik Kebijaksanaan dan Pembangunan*. Jakarta: Dian Lestari Grafika.
- Subagyo, Joko. (2011). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suwitri, Sri. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Keban, Yeremias T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Widodo, Joko. (2008). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
- Winarno, Budi. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi kasus*. Yogyakarta: CAPS.

## Sumber lain :

- Badan Pusat Statistik  
Rencana Strategis DISDIKPORA  
Kabupaten Batang Tahun 2012-2017
- Indah, Fransiska Sari. (2013). *Jumlah Pengangguran Saat Ini Didominasi Oleh Kaum Pemuda*. Dalam <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/jumlah-pengangguran-saat-ini-didominasi-oleh-kaum-pemuda/>. Diakses pada 9 November pukul 15.28 WIB.
- (2012, Mei 15). Bappenas: Tingkat Pengangguran Pemuda Masih Tinggi. Dalam <http://news.liputan6.com/read/401613/bappenas-tingkat-pengangguran-pemuda-masih-tinggi/>. Diakses pada 9 November pukul 15.55.